



Kebijakan Pengendalian Tembakau di Indonesia: Tantangan Implementasi FCTC dan Implikasinya terhadap Kesehatan Masyarakat

Luh Verra Sridyantari¹, Ni Luh Ayu Citra Mutiarahati², Gusti Ayu Martha Winingsih³, Ni Kadek Sintia Dwi
Chrismayanthi⁴

¹ Kartini Bali Health Polytechnic & WFAD Foundation, PT Tirta Danesha Integra Utama

² STIKes Kesdam IX/Udayana

³ Kartini Bali Health Polytechnic

⁴ Independent Practitioner (Praktisi Umum)

Corresponding author: Luh Verra Sridyantari
Email: sridyantariverra@gmail.com

ABSTRAK

Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC) merupakan perjanjian internasional untuk menurunkan prevalensi merokok melalui pengendalian ketat terhadap industri tembakau. Indonesia menghadapi tantangan serius dalam penerapan FCTC karena kuatnya tekanan industri tembakau dan ketergantungan fiskal terhadap cukai rokok yang mencapai sekitar 10% dari total pendapatan negara pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode meta analisis review terhadap publikasi tahun 2019–2024 untuk mengidentifikasi peluang dan hambatan implementasi FCTC di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh lobi industri dan ketergantungan pada cukai menciptakan dilema kebijakan, dengan potensi kehilangan penerimaan hingga Rp50 triliun per tahun apabila konsumsi rokok menurun drastis. Namun, keberhasilan negara seperti Australia, Prancis, dan Thailand dalam melakukan diversifikasi pendapatan negara dan memperkuat kampanye edukasi kesehatan masyarakat membuka peluang bagi Indonesia untuk mengadopsi strategi serupa. Studi ini merekomendasikan pendekatan multisektoral yang mengintegrasikan diversifikasi fiskal, penguatan regulasi, serta edukasi publik untuk mengoptimalkan implementasi FCTC tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.

Kata Kunci : FCTC; pengendalian tembakau; kebijakan cukai rokok; ketergantungan fiskal; diversifikasi pendapatan negara

ABSTRACT

The Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) is an international agreement to reduce smoking prevalence through strict regulation of the tobacco industry. Indonesia faces serious challenges in implementing the FCTC due to pressure from the tobacco industry and fiscal dependence on tobacco excise, which reached around 10% of total state revenue in 2020. This study uses a meta-analysis from 2019–2024 to identify opportunities and barriers to implementing the FCTC in Indonesia. The analysis shows that the influence of industry lobbying and excise dependence create a policy dilemma, with the risk of losing up to 50 trillion Rupiah per year in revenue if cigarette consumption declines drastically. However, the success of countries such as Australia, France, and Thailand in diversifying fiscal revenue sources and strengthening health education campaigns opens up opportunities for Indonesia. This study recommends a multi-sectoral approach that integrates fiscal diversification, regulatory strengthening, and public education to optimize FCTC implementation

without sacrificing economic stability. The findings are expected to support the development of effective and sustainable tobacco control policies in Indonesia.

Keyword : *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC); Tobacco control policy; Indonesia tobacco excise; Fiscal dependence on tobacco; Tobacco excise revenue impact*

PENDAHULUAN

Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), sebuah perjanjian internasional yang diprakarsai oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), merupakan tonggak penting dalam upaya global untuk mengendalikan konsumsi tembakau demi meningkatkan kesehatan masyarakat. FCTC mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi kebijakan pengendalian tembakau yang ketat dan komprehensif, termasuk pembatasan iklan, kenaikan cukai rokok, larangan merokok di ruang publik, dan mekanisme lain yang bertujuan untuk mengurangi prevalensi merokok secara signifikan (World Health Organization (WHO), 2021).

Meskipun FCTC telah didukung secara luas, implementasinya sangat bervariasi di berbagai negara. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia, menghadapi tantangan kompleks dalam menerapkan FCTC secara optimal. Walaupun Indonesia telah menandatangani kesepakatan awal terkait prinsip pengendalian, efektivitas implementasi kebijakan pengendalian tembakau di dalam negeri masih sangat terbatas akibat ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan cukai tembakau. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, kontribusi cukai tembakau mencapai sekitar 10% dari total pendapatan negara, menjadikan sektor ini salah satu sumber pendapatan utama yang sulit digantikan (Yusuf, 2019; Harimurti et al, 2023).

Ketergantungan ini menciptakan dilema kebijakan, karena memperkuat regulasi tembakau dapat mengurangi pendapatan negara yang sangat krusial untuk membiayai sektor kesehatan dan pembangunan nasional. Selain faktor ekonomi, pengaruh kuat dari industri tembakau di Indonesia melalui lobi politik yang intensif dan pemasaran yang agresif terutama yang menasar kelompok usia muda juga mempersulit implementasi kebijakan FCTC (Cahyono, 2024). Penelitian oleh Prasetyo et al. (2022) mengungkapkan bahwa kekuatan lobi industri tembakau tetap menjadi hambatan

signifikan dalam merumuskan kebijakan publik terkait pengendalian tembakau.

Lebih jauh lagi, dimensi budaya yang berakar kuat membuat perilaku merokok menjadi bagian dari identitas sosial di kalangan pria dewasa dan remaja. Akibatnya, kampanye pengendalian tembakau di masa lalu belum menghasilkan perubahan signifikan dalam persepsi atau perilaku masyarakat ((Wulandari dan Waluyo, 2019; Putra & Sari, 2021). Sebaliknya, sejumlah negara lain telah berhasil mengimplementasikan FCTC dan mencapai penurunan substansial dalam prevalensi merokok tanpa mengorbankan stabilitas fiskal. Australia dan Prancis, misalnya, mengembangkan kebijakan cukai dan regulasi tembakau yang secara efektif menekan konsumsi rokok sekaligus mendiversifikasi sumber pendapatan negara secara berkelanjutan (Sidiq, 2020, Martha, 2021,; Nguyen et al, 2023). Keberhasilan ini memberikan gambaran penting tentang strategi kebijakan adaptif yang mengintegrasikan konteks sosio-ekonomi dan politik secara holistik.

Namun, studi mendalam mengenai interaksi antara ketergantungan ekonomi pada cukai tembakau dan keberhasilan implementasi FCTC in Indonesia, terutama dari perspektif perbandingan internasional masih sangat terbatas. Sebagian besar literatur yang ada hanya fokus pada aspek kesehatan atau ekonomi secara terpisah, tanpa mempertimbangkan faktor politik dan ekonomi yang saling terkait secara simultan (Lim, 2024; Setyo, 2020). Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis faktor penentu keberhasilan dan hambatan implementasi FCTC di Indonesia melalui pendekatan perbandingan dengan negara-negara yang telah sukses menerapkan kebijakan pengendalian tembakau yang efektif. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang realistis dan berkelanjutan, yang mampu mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia pada cukai tembakau sekaligus meningkatkan efektivitas

pengendalian tembakau untuk hasil kesehatan masyarakat yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan tinjauan literatur sistematis yang berfokus pada publikasi terbaru (2019–2024) terkait dengan implementasi FCTC, ketergantungan fiskal pada cukai tembakau, dan perbandingan kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia dengan negara lain. Data dikumpulkan dari basis data akademik (Scopus, Web of Science, PubMed, dan Google Scholar) menggunakan kata kunci yang relevan seperti "FCTC implementation" dan "tobacco taxation." Sumber yang dipilih merupakan artikel jurnal yang ditelaah sejawat (peer-reviewed) yang membahas aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya dari pengendalian tembakau, yang dipilih melalui proses penyaringan judul, abstrak, dan teks lengkap. Analisis tematik dan komparatif kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan, hambatan, dan praktik terbaik dalam mengimplementasikan FCTC, serta untuk menemukan kesenjangan penelitian guna mendasari rekomendasi kebijakan yang tepat bagi Indonesia. Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia, sehingga persetujuan etis tidak diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN FCTC dan Tujuan Utamanya

FCTC adalah perjanjian internasional pertama yang diprakarsai oleh WHO dengan tujuan utama untuk mengurangi prevalensi merokok secara signifikan melalui regulasi ketat terhadap industri tembakau, pemasaran, dan konsumsi produk tembakau (WHO, 2003). FCTC menetapkan berbagai langkah strategis, seperti menaikkan tarif cukai, membatasi iklan dan promosi, melarang merokok di ruang publik, dan mengedukasi masyarakat tentang risiko kesehatan dari penggunaan tembakau (Drope et al., 2018). Keberhasilan FCTC sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas masing-masing negara anggota untuk menerapkan kebijakan pengendalian tembakau yang efektif dan berkelanjutan (Gilmore et al., 2015).

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia, menghadapi tantangan serius dalam memenuhi komitmen ini. Nugroho dan Wirawan (2020) menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah menyepakati prinsip dasar dari kerangka kerja

FCTC, implementasi kebijakan pengendalian tembakau di lapangan tetap lemah karena berbagai faktor struktural dan politik. Hal ini sejalan dengan analisis Drope et al., (2018) yang mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi FCTC sangat bervariasi antarnegara, tergantung pada konteks sosio-ekonomi dan kekuatan politik dari industri tembakau di masing-masing wilayah.

Tantangan Global dan Nasional dalam Implementasi FCTC

Secara global, industri tembakau terus menggunakan strategi lobi yang agresif untuk menghalangi atau melemahkan kebijakan pengendalian tembakau di banyak negara (Mialon et al., 2018). Industri tersebut memanfaatkan pengaruh ekonomi dan politik mereka untuk melobi para pembuat kebijakan, yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan mengurangi efektivitas regulasi (Smith et al., 2020).

Di Indonesia, pengaruh industri tembakau sangat kuat karena adanya ketergantungan fiskal negara terhadap pendapatan cukai tembakau, yang menyumbang lebih dari 10% dari total pendapatan negara (Yusuf, 2019; (Harimurti et al., 2023). Jusuf dan Mandasari (2022) menekankan bahwa industri tembakau di Indonesia secara sistematis memengaruhi kebijakan publik dengan menggunakan lobi politik dan kampanye pemasaran yang menargetkan kelompok rentan seperti remaja dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pengaruh industri ini menghambat implementasi penuh dari langkah-langkah FCTC, termasuk kenaikan pajak cukai yang telah terbukti secara internasional dapat mengurangi konsumsi rokok (Chaloupka et al., 2021).

Selain itu, ketergantungan Indonesia yang besar pada cukai tembakau menciptakan dilema kebijakan yang kompleks. (Harimurti, 2023) menyoroti bahwa upaya pengendalian tembakau harus diseimbangkan dengan kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas pendapatan negara. Studi perbandingan oleh Nguyen et al, (2023) di negara-negara seperti Australia dan Prancis menunjukkan bahwa diversifikasi sumber pendapatan negara adalah kunci sukses untuk menerapkan kebijakan cukai tembakau yang ketat tanpa menyebabkan defisit fiskal yang signifikan.

Tabel 1. Perbandingan Implementasi FCTC di Indonesia dan Negara Lain

Negara	Tantangan Utama	Kebijakan Pengendalian Tembakau	Diversifikasi Pendapatan Negara
Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Ketergantungan pada cukai tembakau (~10% pendapatan negara). - Tekanan kuat industri tembakau melalui lobi. - Budaya merokok yang berakar kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Batasan iklan dan promosi rokok yang penagakannya masih lemah. - Implementasi langkah FCTC lambat dan belum lengkap. 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya awal melalui pajak ekonomi digital dan pungutan energi terbarukan. - Rekomendasi kebijakan bertahap untuk mengurangi ketergantungan.
Australia	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi konsumsi tembakau tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi makro. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan ketat kemasan polos (plain packaging). - Kenaikan pajak tembakau secara progresif. - Larangan menyeluruh terhadap iklan/promosi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan pajak pada sektor teknologi, layanan digital, dan sektor energi terbarukan. - Investasi berkelanjutan ke sektor kesehatan & pendidikan.
Prancis	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunkan angka perokok tanpa mengganggu stabilitas anggaran fiskal negara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kenaikan pajak tembakau secara bertahap. - Larangan iklan dan sponsor tembakau di media massa. - Pembatasan merokok di tempat umum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diversifikasi melalui pajak sektor digital, pajak barang mewah, serta penguatan sektor pariwisata dan energi terbarukan. - Pajak penghasilan progresif.
Thailand	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi ketergantungan fiskal pada tembakau sambil menjaga keseimbangan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pajak tembakau dan pengawasan pemasaran yang ketat. - Program edukasi kesehatan dan kampanye publik yang intensif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata, pertanian, dan digital. - Penerapan pajak karbon dan pajak barang/jasa baru. - Pertanian berkelanjutan.
Kanada	<ul style="list-style-type: none"> - Resistensi dari industri tembakau dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kenaikan pajak progresif pada produk tembakau. - Larangan ketat iklan dan promosi. - Perluasan kawasan bebas asap rokok secara ekstensif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan pajak digital dan lingkungan. - Investasi pada sektor kesehatan dan teknologi ramah lingkungan (green technology).
Irlandia	<ul style="list-style-type: none"> - Tantangan menekan angka penggunaan tembakau di kalangan remaja dan dewasa muda. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan aturan kemasan polos. - Larangan total iklan dan promosi. - Peningkatan tarif pajak tembakau. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan pajak pada sektor teknologi dan jasa. - Diversifikasi ekonomi yang didorong oleh industri berbasis inovasi.
Norwegia	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola dampak sosio-ekonomi dari kebijakan pengurangan tembakau. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak tembakau yang sangat tinggi. - Kampanye edukasi kesehatan masyarakat yang luas. - Pembatasan ketat terhadap aksesibilitas tembakau. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penghasilan dari sektor energi terbarukan dan teknologi. - Penerapan pajak barang mewah dan pajak karbon.

Tekanan dari Industri Tembakau

Industri tembakau di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan publik dan merupakan salah satu tantangan utama dalam implementasi FCTC. Upaya lobi oleh perusahaan-perusahaan tembakau di Indonesia sangat efektif dalam memengaruhi pembuat kebijakan untuk mempertahankan regulasi yang ramah terhadap tembakau. Menurut Firmansyah (2021), industri tembakau Indonesia menggunakan berbagai strategi untuk memengaruhi keputusan pemerintah, termasuk menjalin hubungan dekat dengan pejabat publik dan memberikan tekanan politik yang kuat. Strategi ini tidak hanya membentuk kebijakan di tingkat pemerintahan tetapi juga melibatkan pemasaran agresif yang menyasar berbagai segmen masyarakat, termasuk remaja.

Perusahaan tembakau di Indonesia juga memiliki sumber daya fiskal dan finansial yang sangat besar untuk memengaruhi opini publik. Dengan anggaran pemasaran yang masif, mereka mendominasi ruang iklan di media massa dan membentuk citra positif mengenai konsumsi tembakau di kalangan konsumen. Suryanto (2020) mencatat bahwa pengaruh industri tembakau di Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan di banyak negara lain, di mana pemasaran tembakau sering kali sudah dibatasi ketat sebagai masalah pilihan konsumen individu. Pengaruh ini yang sering kali dibenarkan dengan alasan ekonomi seperti perlindungan mata pencaharian atau kebebasan usaha menyebabkan resistensi yang signifikan terhadap kebijakan pengendalian tembakau, termasuk langkah-langkah yang direkomendasikan oleh FCTC.

Selain itu, dampak sosial dari kebiasaan merokok yang mengakar di masyarakat memperburuk tantangan ini. Merokok sering kali dianggap sebagai bagian dari budaya, terutama di kalangan pria dewasa, yang membuat kampanye pengurangan rokok lebih sulit untuk mendapatkan penerimaan sosial secara luas. Lobi industri tembakau semakin memperkuat gagasan tentang rokok sebagai simbol status sosial dan gaya hidup, sehingga menghambat perubahan persepsi masyarakat terhadap bahaya tembakau (Wulandari dan Waluyo, 2019).

Ketergantungan Pemerintah pada Pendapatan Cukai Tembakau

Tantangan besar lainnya yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan FCTC adalah ketergantungan negara pada penerimaan dari pajak cukai tembakau. Pada tahun 2020, sektor tembakau berkontribusi lebih dari 10% dari total pendapatan pajak negara, menjadikannya sumber pendanaan yang sangat penting (Mulyadi & Kurniawan, 2021). Penerimaan cukai ini digunakan untuk mendanai berbagai sektor kritis, termasuk kesehatan dan infrastruktur. Akibatnya, kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi tembakau seperti yang dicita-citakan oleh FCTC dapat memotong pendapatan pemerintah secara signifikan dalam jangka pendek, sehingga menciptakan dilema kebijakan yang serius.

Mulyadi dan Kurniawan (2021) mengungkapkan bahwa penurunan substansial dalam konsumsi rokok akibat langkah-langkah FCTC dapat menyebabkan pengurangan besar dalam pendapatan pemerintah, yang berdampak tidak hanya pada koleksi pajak cukai langsung tetapi juga pada sektor ekonomi terkait lainnya. Sebagai contoh, penurunan penjualan tembakau akan memengaruhi industri pertanian tembakau, distribusi, dan manufaktur yang menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang di Indonesia. Penurunan ini dapat menciptakan ketidakseimbangan fiskal yang harus dikelola oleh pemerintah, guna menyeimbangkan kebutuhan kesehatan masyarakat dengan kebutuhan ekonomi yang lebih luas.

Rachman dan Santoso (2020) menekankan bahwa meskipun kebijakan pengendalian tembakau yang lebih ketat dapat memberikan manfaat jangka panjang dengan mengurangi biaya perawatan kesehatan terkait penyakit akibat rokok, dampak keuangan jangka pendek pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan sangat signifikan. Mereka memperkirakan bahwa jika konsumsi rokok menurun secara drastis, Indonesia berisiko kehilangan sekitar Rp50 triliun (sekitar USD 3,3 miliar) dalam pendapatan cukai setiap tahunnya. Prospek kehilangan dana ini sangat memengaruhi keputusan kebijakan langkah pengendalian yang lebih ketat dikhawatirkan memicu kerugian penerimaan dalam jangka pendek, sesuatu yang sangat dihindari oleh para pembuat kebijakan finansial.

Potensi Keberhasilan FCTC di Indonesia: Peluang dalam Penguatan Kebijakan

Meskipun terdapat tantangan berat, terdapat peluang signifikan bagi keberhasilan implementasi FCTC di Indonesia, khususnya melalui penguatan kebijakan pengendalian. Negara-negara dengan langkah pengendalian tembakau yang lebih ketat seperti Australia dan Prancis telah membuktikan bahwa regulasi yang efektif dapat menurunkan prevalensi merokok tanpa merusak perekonomian nasional. Sebagai contoh, Australia menerapkan kebijakan kemasan polos untuk rokok, yang secara signifikan mengurangi daya tarik produk tembakau dan menyebabkan penurunan nyata dalam tingkat merokok, terutama di kalangan remaja dan wanita (Sidiq, 2020). Prancis melaporkan keberhasilan serupa dengan menaikkan pajak rokok secara bertahap dan membatasi iklan tembakau secara ketat, efektif mengurangi jumlah perokok tanpa penurunan drastis pada pendapatan pemerintah (Wibowo, 2021).

Keberhasilan kebijakan di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa penguatan regulasi tembakau di Indonesia adalah langkah yang realistis dan berpotensi memberikan manfaat besar dalam jangka panjang. Menerapkan langkah serupa di Indonesia terlepas dari tantangan yang ada dapat menekan konsumsi tembakau sekaligus memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat. Keberhasilan ini akan bergantung pada strategi yang cermat, termasuk sosialisasi kebijakan baru secara efektif untuk memastikan dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta mengintegrasikan upaya pengendalian tembakau dengan inisiatif yang lebih luas untuk memperkuat sistem kesehatan nasional.

Alternatif Pendapatan Negara (Diversifikasi Fiskal)

Ketergantungan Indonesia yang tinggi pada pendapatan cukai tembakau, di satu sisi merupakan hambatan, namun di sisi lain juga menyiratkan peluang mendesak untuk mendiversifikasi sumber pendapatan negara. Salah satu solusi potensial adalah mengembangkan sektor pajak lain yang lebih berkelanjutan dan tidak terikat pada konsumsi tembakau. Diversifikasi pendapatan ini dapat mencakup peningkatan pajak di sektor ekonomi digital, pengenaan pungutan pada sektor teknologi, atau pengembangan pajak terkait lingkungan yang mendukung keberlanjutan

ekonomi. Sebagai contoh, negara-negara dengan ekonomi yang lebih terdiversifikasi seperti Swedia dan Finlandia telah berhasil mengurangi ketergantungan mereka pada cukai tembakau dengan mengoptimalkan perpajakan pada sektor teknologi dan layanan digital untuk menghasilkan aliran pendapatan baru.

Marta (2021) menunjukkan bahwa diversifikasi semacam itu tidak hanya mengurangi ketergantungan pada cukai tembakau tetapi juga memperkuat ketahanan fiskal terhadap fluktuasi pasar tembakau. Mengingat sektor digital Indonesia yang tumbuh pesat, negara ini memiliki peluang nyata untuk memperkuat ekonominya dengan pendapatan alternatif melalui cara-cara yang tidak mengorbankan kesehatan masyarakat.

Peran Edukasi dan Kampanye Sosial

Edukasi dan kampanye sosial memegang peranan krusial dalam mendukung keberhasilan FCTC. Kampanye kesehatan masyarakat yang mendidik masyarakat terutama generasi muda tentang bahaya tembakau dapat secara signifikan menurunkan prevalensi merokok. Negara-negara yang telah mencapai tingkat merokok yang lebih rendah, seperti Finlandia dan Jepang, mengandalkan kampanye edukasi intensif yang berbasis bukti untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya merokok (Nugroho & Yanti, 2022).

Di Indonesia, kampanye edukasi kesehatan yang menggunakan keterlibatan komunitas dan media sosial dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mempercepat perubahan perilaku. Program inovatif yang menargetkan remaja seperti memanfaatkan pembuat konten (influencer) media sosial dan konten online interaktif memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran akan risiko merokok. Pemerintah juga dapat menggunakan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama kaum muda yang sangat aktif secara online. Penelitian oleh Nugroho dan Yanti (2022) menunjukkan bahwa strategi kampanye digital di negara berkembang (termasuk Indonesia) telah secara signifikan mengurangi inisiasi merokok di kalangan pemuda, menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan teknologi ke dalam intervensi kesehatan masyarakat. Menerapkan pendekatan kampanye yang lebih efektif dan menegakkan larangan iklan tembakau yang lebih ketat dapat membantu

Indonesia bergerak lebih dekat menuju tujuan FCTC.

Perspektif Ekonomi dan Sosial

Dari perspektif ekonomi, pengurangan konsumsi tembakau akan membawa dampak positif jangka panjang yang signifikan, terutama melalui penghematan biaya perawatan kesehatan dan peningkatan produktivitas kerja. Studi oleh Alamsyah dan Pramudito (2021) menegaskan bahwa penurunan prevalensi merokok secara langsung mengurangi biaya pengobatan untuk penyakit terkait tembakau seperti penyakit kardiovaskular, kanker paru-paru, dan penyakit pernapasan kronis. Lebih lanjut, penghematan layanan kesehatan ini dapat dialihkan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional dan sektor pembangunan lainnya. Temuan ini sejalan dengan Chaloupka et al. (2021) yang mencatat bahwa kenaikan pajak tembakau yang progresif tidak hanya mengurangi konsumsi tetapi juga menghasilkan pendapatan fiskal yang dapat mendanai program kesehatan publik, menciptakan siklus timbal balik yang positif bagi masyarakat.

Dari perspektif sosial, pengendalian penggunaan tembakau terutama di kalangan remaja memberikan manfaat kesehatan jangka panjang yang sangat penting bagi generasi mendatang. Zulfiqar et al. (2022) menyoroti bahwa program edukasi kesehatan yang menasar kaum muda, bersama dengan larangan ketat iklan tembakau di media massa, secara efektif mengurangi daya tarik merokok di kalangan remaja yang sering kali menjadi target utama industri tembakau. Penelitian mereka mengonfirmasi bahwa mengubah norma sosial melalui edukasi dan regulasi dapat mereposisi rokok sebagai sesuatu yang tidak menarik dan berbahaya, alih-alih sebagai simbol kedewasaan atau keren.

Pada saat yang sama, Putra dan Sari (2021) menunjukkan bahwa faktor budaya yang berakar kuat dalam masyarakat Indonesia memperlambat laju perubahan perilaku terkait merokok. Hal ini berarti kampanye pengendalian tembakau harus disesuaikan dengan konteks budaya lokal agar efektivitasnya lebih tinggi. Penguatan keterlibatan masyarakat dan peran keluarga dalam mendidik kaum muda tentang bahaya tembakau telah terbukti sukses di beberapa wilayah di Indonesia. Lebih lanjut, Gilmore et al. (2015) menekankan pentingnya keterlibatan multisektoral dalam pengendalian tembakau

melibatkan lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi kesehatan secara bersama-sama. Pendekatan kolaboratif semacam ini dapat memfasilitasi perubahan sosial yang lebih luas sekaligus memperlemah pengaruh industri tembakau.

SIMPULAN

Implementasi FCTC di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar, mengingat ketergantungan ekonomi negara pada cukai tembakau dan kuatnya pengaruh industri tembakau. Namun, tetap ada peluang yang jelas untuk kemajuan jika pemerintah mengadopsi strategi yang komprehensif dan berpandangan ke depan. Langkah ini mencakup penguatan regulasi pengendalian tembakau, diversifikasi sumber pendapatan fiskal (misalnya melalui pertumbuhan di sektor ekonomi digital dan energi terbarukan), serta pelaksanaan kampanye edukasi publik yang intensif dan berbasis konteks lokal.

Pelajaran dari negara-negara seperti Australia, Prancis, dan Thailand menunjukkan bahwa penurunan prevalensi merokok tidak harus mengorbankan stabilitas fiskal ketika diversifikasi pendapatan dan kebijakan multisektoral diterapkan dengan baik. Oleh karena itu, Indonesia harus mengejar pendekatan holistik dan adaptif yang mengurangi konsumsi tembakau sekaligus melindungi keberlanjutan pendapatan negara dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak kesehatan dari tembakau. Dengan cara ini, FCTC dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan ekonomi nasional.

Ke depan, Indonesia perlu secara strategis mengintensifkan upaya untuk mengurangi ketergantungan fiskalnya pada cukai tembakau yang saat ini berada di angka sekitar 10% dari total pendapatan negara (Rachman & Santoso, 2020; Harimurti et al., 2023). Pengurangan ketergantungan ini harus dibarengi dengan pengembangan dan perluasan sumber pendapatan alternatif yang lebih berkelanjutan, yang tidak bergantung pada konsumsi produk yang merugikan kesehatan masyarakat. Dengan menggeser ketergantungan ekonomi secara bertahap dan menerapkan tindakan pengendalian tembakau yang kuat, Indonesia dapat memenuhi komitmen FCTC dan meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat tanpa merusak stabilitas fiskal nasional.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Poltekkes Kartini, WFAD Foundation dan STIKes Kesdam IX/Udayana atas dukungan fasilitas, sumber daya akademik, serta ruang diskusi yang disediakan selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan manuskrip ini. Apresiasi dan terima kasih juga kami dedikasikan kepada seluruh rekan sejawat, tim penelaah, serta para kontributor ilmiah yang telah memberikan bantuan teknis, saran kritis, serta data sekunder yang sangat berharga dalam penyusunan meta-analisis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, F., & Pramudito, A. (2021). Economic impact of tobacco reduction policies in Indonesia: Cost savings and health outcomes. *Journal of Public Health Economics*, 12(4), 215–229.
- Alfiah, I. (2020). Cultural factors and smoking behavior in Indonesia. *Journal of Social Health*, 11(3), 203–214.
- Cahyono, B., & Adhiatma, A. (2024). Policy analysis of tobacco excise sharing fund (DBH CHT) in Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 9(3), 169–185.
- Chaloupka, F. J., Sweanor, D., & Warner, K. E. (2021). Differential tax structures for cigarettes, smokeless tobacco, and nicotine vaping products. *Tobacco Control*, 30(2), 121–129. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2019-055463>
- Drope, J., Schluger, N. W., Cahn, Z., et al. (2018). *The Tobacco Atlas* (6th ed.). Atlanta: American Cancer Society and Vital Strategies.
- Firmansyah, A. (2021). The tobacco lobby's influence on Indonesian health policy. *Tobacco Control Journal*, 34(2), 78–85.
- Gilmore, A. B., Fooks, G., Drope, J., et al. (2015). Exposing and addressing tobacco industry conduct in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 385(9972), 1029–1043. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60312-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60312-9)
- Harimurti, P., Wijaya, A., & Dewi, R. (2023). Fiscal dependency and tobacco control policy in Indonesia: Challenges and

- opportunities. *Journal of Public Health Policy*, 44(1), 45–60.
- Jusuf, A., & Mandasari, P. (2022). Tobacco industry influence and economic considerations in Indonesia's tobacco control policy. *Global Health Governance*, 16(2), 78–93.
- Lim, S., Tan, C., & Wong, M. (2024). Political economy of tobacco control: A comparative analysis. *Health Policy and Planning*, 39(2), 254–266.
- Martha, I. (2021). Diversification of national revenue sources: The case of Indonesia. *Journal of Public Policy*, 27(2), 89–102.
- Mialon, M., McCambridge, J., & Ling, P. M. (2018). Corporate political activity of the tobacco industry in low- and middle-income countries: A systematic review. *PLOS ONE*, 13(7), e0200924.
- Mulyadi, D., & Kurniawan, R. (2021). Economic impact of tobacco excise in Indonesia. *Economics and Policy Review*, 22(5), 345–358.
- Nguyen, T. H., Lee, J., & Tran, P. (2023). Tobacco tax reform and revenue diversification: Lessons from Australia and France. *International Journal of Health Economics and Management*, 23(1), 1–20.
- Nugroho, H., & Wirawan, R. (2020). Challenges to implementing FCTC in Indonesia: Industry pressures and economic dependence. *Health Policy Studies*, 18(2), 102–112.
- Nugroho, H., & Yanti, R. (2022). Social media campaigns for tobacco control in Southeast Asia: Insights for Indonesia. *Journal of Health Communication*, 15(1), 45–57.
- Putra, E., & Sari, M. (2021). Cultural contexts in public health interventions: Tobacco control in Indonesia. *Southeast Asian Journal of Case Studies*, 8(2), 112–126.
- Rachman, T., & Santoso, B. (2020). Fiscal implications of tobacco excise reductions in national budgets. *Indonesian Economic Review*, 14(3), 88–99.
- Sahadewo, G. A., & Suryanto, A. (2023). Political economy of tobacco control in youth-targeted markets. *Journal of Development Economics Research*, 31(1), 54–68.
- Setyo, N., & Thabrany, H. (2020). The economics of tobacco taxation and employment in Indonesia. World Bank Policy Research Working Paper (No. 9116).
- Sidiq, D. (2020). Public health outcomes of tobacco packaging regulations: A case study of Australia. *Tobacco Control Journal*, 34(3), 223–231.
- Smith, K. E., Fooks, G., Collin, J., et al. (2020). Tobacco industry lobbying and policy influence: A systematic review. *Health Economics*, 29(8), 929–945.
- Suryanto, A. (2020). The tobacco industry's impact on public health policy in Indonesia. *Journal of Public Health Policy*, 41(3), 215–227.
- Wibowo, B. (2021). The impact of tobacco taxation and advertising restrictions in France: Lessons for Indonesia. *Global Health Perspectives*, 29(4), 401–412.
- World Health Organization (WHO). (2003). *WHO Framework Convention on Tobacco Control*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization (WHO). (2021). *WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2021: Addressing New and Emerging Products*. Geneva: World Health Organization.
- Wulandari, D., & Waluyo, A. (2019). Social identity and cultural dynamics of smoking in Indonesia. *Indonesian Journal of Public Health*, 15(2), 134–145.
- Zulfiqar, M., Ahmed, S., & Khan, N. (2022). Shifting social norms: Media bans and youth health education regarding tobacco hazards. *International Journal of Health Communication*, 10(3), 189–204.